



PANCASILA DITENGAH PRAGMATISME POLITIK DI INDONESIA PADA ERA DEMOKRASI

Universitas Victory Sorong

I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani¹ dan Rombang Sahata Silalahi²

Email: sastranidewa@gmail.com*

Abstrak

Di era demokrasi langsung menuntut pembaharuan hukum nasional. Salah satu bagian pembaharuan hukum nasional, yaitu pembentukan undang-undang yang mengatur kehidupan seluruh bidang kehidupan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah seharusnya menjadi landasan bagi para elit pemerintahan maupun politik di Indonesia untuk bertindak dan berperilaku terutama dalam menentukan arah kebijakan maupun produk hukum perundang-undangan di era demokrasi ini. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan di bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk sosial politik maupun pemerintahan tentunya harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan hukum nasional. Pancasila harus disebutkan sebagai bintang pemandu arah kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangatlah penting keberadaan peraturan perundang-undangan, sikap dari politisi juga turut menjadi faktor utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Kata kunci : Demokrasi, Pancasila, Pembentukan undang-undang, sikap politisi

Abstract

In the era of democracy directly demands the renewal of national law. One part of the renewal of national law, namely the formation of laws that govern the lives of all fields of life. Pancasila as the ideology of the Indonesian people should be the foundation for the government and political elites in Indonesia to act and behave, especially in determining the direction of policy and the product of laws and regulations in this democratic era. As a state of law, all aspects of life in the social, national and state fields including social politics and government must of course be based on laws that are in accordance with national law. Pancasila must be mentioned as the guiding star in the direction of the policy on legal reform in Indonesia. In the formation of legislation, legal politics is very important the existence of legislation, the attitude of politicians is also a major factor in the formation of legislation.

Keywords: Democracy, Pancasila, Formation of legislation, politicians' attitudes



1. PENDAHULUAN

Eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara telah membuktikan kemampuannya dalam mengakomodasi pluralitas bangsa Pancasila Sebagai Ideologi Negara dalam Pembangunan Demokrasi Indonesia. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang menjadi landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berperan sebagai falsafah negara, tetapi juga menjadi panduan dalam mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dalam konteks pembangunan demokrasi, Pancasila menjadi instrumen penting yang menjembatani keberagaman Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi universal (Monitasari et al., 2021). Peran Pancasila dalam demokrasi tidak dapat dipisahkan, Menurut Sakinah & Dewi (2021), implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi Indonesia telah menciptakan karakteristik unik yang membedakannya dengan sistem demokrasi di negara lain. Keunikan ini tercermin dari bagaimana Indonesia mampu memadukan prinsip-prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Erlina (2019) menunjukkan bahwa Pancasila telah berhasil menjadi filter dalam adopsi nilai-nilai demokrasi global, sehingga praktik demokrasi di Indonesia tetap sejalan dengan kepribadian bangsa dan tidak kehilangan jati dirinya. Sebagai ideologi negara, Pancasila menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi dan dinamika politik kontemporer. Menurut Banerjee et al. (2021) menemukan bahwa penyebaran ideologi di luar batas negara dan dampak sistem politik global telah menimbulkan sejumlah masalah baru yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan demokratis. Sebaliknya, Pancasila telah menunjukkan bahwa itu dapat berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi demokrasi kontemporer. Ini diperkuat oleh hasil Rizal et al. (2022) yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat membantu melindungi demokrasi dari berbagai ancaman, seperti ekstremisme, radikalisme, dan politisasi identitas yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah bangsa, memberikan pedoman moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan politik. Pancasila menegaskan nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, kemanusiaan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan etika politik. Namun, relevansi dan kekuatan Pancasila sebagai landasan etika politik sering dipertanyakan dalam konteks politik modern. Mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik sehari-hari



sangat sulit karena faktor-faktor seperti globalisasi, pluralitas ideologi, kemajuan teknologi informasi, dan masalah internal seperti korupsi, intoleransi, dan polarisasi politik.

(Mahendra, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pancasila Sebagai Etika Politik” mengemukakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai etika dalam berpolitik menjadi acuan kegiatan politik masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini (Kartika, 2018) juga melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Etika Politik di Indonesia” mengemukakan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan acuan normatif dalam etika politik di Indonesia, sehingga segala aktivitas politik termasuk penyelenggaraan negara, menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas, (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis, dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral.

Kemudian (Febriany & Dewi, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia” mengemukakan bahwa etika politik adalah suatu hal yang paling penting bagi masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dijauhkan dari politik. Etika politik sangat dibutuhkan di setiap kondisi karena tujuan dari etika politik adalah membawa kebaikan bersama. Penerapan etika politik di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena masih ada tindak pidana korupsi yang jelas-jelas bertentangan dengan etika.

Dalam konteks yang demikian, penelitian mengenai peran Pancasila sebagai landasan etika politik menjadi semakin penting dengan memahami bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara berkontribusi pada pembangunan demokrasi Indonesia menjadi sangat penting khususnya ditengah pragmatism politik. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai Pancasila ditengah Pragmatisme Politik di Indonesia pada Era Demokrasi Berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh rumusan masalah penelitian ini, antara lain:

- 1) Bagaimana Etika Politik dalam menjalankan demokrasi
- 2) Bagaimana Peran Pancasila di tengah Pragmatisme Politik di Indonesia pada era demokrasi

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Relevansi Pancasila sebagai Fondasi Nilai Moral dalam Tata Kelola Politik Demokrasi serta mengetahui Peran Pancasila di tengah Pragmatisme Politik di Indonesia pada era demokrasi



2. KAJIAN TEORI

2.1 Etika Politik Aristoteles

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial, yang membahas norma moral yang seharusnya memengaruhi sikap dan tindakan manusia. Ini karena hampir semua kewajiban manusia terkait dengan fakta bahwa mereka adalah makhluk sosial. Tidak ada dasar negara yang diberikan oleh etika politik. Etika bersifat reflektif, artinya ia menawarkan ide-ide tentang cara mengatasi masalah hidup, tetapi tidak menawarkan cara untuk memecahkannya. Oleh karena itu, etik politik mempertanyakan kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai manusia, bukan sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan hal lainnya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia tidak sama dengan kebaikan manusia sebagai orang Afrika.

Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.

Selain itu, etika politik dapat digunakan untuk mengkritik ideologi, bukan hanya negara atau hukum, tetapi juga paham dan taktik legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, etika politik hanya dapat membantu upaya masyarakat untuk mengaitkan ideologi negara yang luhur dengan kehidupan politik. Pertimbangkan, misalnya, apa arti keadilan sosial dan bagaimana kekuasaan harus diperlakukan agar sesuai dengan martabat manusia.

Pendekatan Aristoteles tentang politik terdapat dalam bukunya *La Politica*, dan sedikit meluas dalam beberapa bagian yang relevan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Rhetoric* dan *Methaphysic*. Menurut Aristoteles, politik adalah ilmu praktis, tujuan politik “bukanlah pengetahuan melainkan tindakan”. Teori politik menaruh perhatian pada watak manusia atau dengan kata lain tindakan bebas atau sukarela manusia (Pasaribu, 2016). memerlukan tindakan manusia yang bebas dan sukarela, sehingga teori politik memerlukan lebih dari sekedar peningkatan pengetahuan: teori politik memerlukan kehendak yang jujur.

Aristoteles menekankan bahwa pelacakan yang sungguh-sungguh kepada watak manusia merupakan hal pokok bagi teori politik. Teori politik haruslah didasari atas watak



manusia. Karena fungsi negara adalah untuk membantu individu mencapai tujuannya. Bertalian dengan ini dalam buku *Ethics*, Aristoteles menekankan bahwa tujuan alamiah manusia adalah kebahagiaan. Jadi negara haruslah membuat seluruh warganya memperoleh kebahagiaan (Crisp, 2014). Adapun Teori politik Aristoteles mencakup beberapa hal, di antaranya:

1. Definisi politik

Aristoteles mendefinisikan politik sebagai studi tentang hukum, tindakan warga negara, dan kepemimpinan. Ia juga menganggap politik sebagai "master of science" yang merupakan kunci untuk memahami lingkungan.

2. Teori Negara

Aristoteles berpendapat bahwa negara adalah persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang kukuh. Negara dibentuk dari persekutuan desa yang lama kelamaan membentuk negara kota (Polis).

3. Bentuk pemerintahan

Aristoteles berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang benar adalah yang dapat menegakkan supremasi hukum. Ia mengemukakan tiga bentuk pemerintahan yang baik, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi.

4. Warga Negara

Aristoteles berpendapat bahwa warga negara adalah bagian dari sistem administrasi hukum dan diatur oleh hukum. Ia juga berpendapat bahwa setiap negara memiliki definisi warga negara yang berbeda-beda tergantung pada jenis pemerintahan yang dianut.

5. Ilmu politik

Aristoteles berpendapat bahwa ilmu politik adalah pemberian hukum yang bijaksana untuk menjadikan warga negara berbudi luhur.

2.2 Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi demokrasi

Nilai, menurut *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, adalah kemampuan suatu benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nilai pada dasarnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu benda yang menarik minat seseorang atau kelompok orang. objektif. Jika sesuatu memiliki nilai, itu memiliki kualitas atau sifat yang melekat. Bunga, misalnya, indah; kata "indah" mengacu pada kualitas atau sifat. Nilai mencakup keharusan,



harapan, dan cita-cita. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang das Sollen atau ideal, bukan das Sein. (Mulyatno & Yosafat, 2022).

Menurut Max Scheler nilai-nilai yang ada itu memiliki tingkatan:

1. Nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (*die Wertreihe des Angenehmen und Unangenehmen*), yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak;
2. Nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (*Werte des vztaalen Fuhlens*) misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum;
3. Nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat;
4. Nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (*wermodalitat des Heiligenung Unheiligeri*). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Mulyatno & Yosafat, 2022).

Sedangkan menurut Notonagoro nilai dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas
3. Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam:
 - a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (*ratio*, budi, cipta) manusia.
 - b. Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (*esthetis*, *goevel*, rasa) manusia.
 - c. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (*will*, *Wollen*, karsa) manusia.



- d. Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia (Mulyatno & Yosafat, 2022).

Berkaitan dengan pengertian nilai di atas, Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Dengan perkataan lain bahwa Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu mengandung nilai material dan nilai vital. Hal ini dapat dibuktikan dari sila-sila Pancasila yang tersusun secara sistematis. Hierarkis, dan bulat utuh (Zulfadli, Siallagan, & Nasution, 2022).

Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan dan motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan perkataan lain nilai-nilai pancasila menjadi suatu yang ideal (das sollen) dan diwujudkan menjadi kenyataan (das sein). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain:

1. Nilai Ketuhanan
2. Nilai Kemanusiaan
3. Nilai Persatuan
4. Nilai Kerakyatan
5. Nilai Keadilan

Nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan masyarakat dan telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu nyata dan nyata. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menentukan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. (Hernadi Affandi, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Metode normatif yuridis digunakan dalam penelitian ini. Metode ini berfokus pada aturan hukum yang ada dan prinsip hukum kontemporer. Data primer, skunder, dan tersier adalah jenis data yang digunakan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi literatur dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum, yang melibatkan penafsiran historis dan penafsiran sistematis.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Etika Politik dalam menjalankan Demokrasi

Etika politik adalah prinsip dan standar moral yang dipegang seseorang atau kelompok saat berpolitik (Cahyadi, 2021). Etika politik juga memiliki aspek individu karena ia membahas kualitas moral pelaku. Etika juga memiliki aspek sosial karena ia mempertimbangkan hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Kekuasaan negara harus demokratis, sesuai dengan hukum, dan tidak bertentangan dengan moralitas, menurut etika politik (Cahyadi, 2021).

Etika politik termasuk wilayah etika sosial yaitu membahas norma-norma yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Dalam perspektif etika politik, manusia memiliki dimensi politis. Dimensi politis manusia, dapat dikaji dari tiga hal. Pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, manusia dengan dimensi kesosialannya. Ketiga, dimensi politis kehidupan manusia. (Handoyo, Wijayanti, Irawan, Khomsani, & Hermawan, 2021). Etika politik tidak hanya berkaitan dengan masalah perilaku etis atau tidak etis para politikus. Etika politik memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu :

- a. dimensi tujuan politik,
- b. dimensi sarana, dan
- c. dimensi aksi politik.

Dalam dimensi "tujuan", tercapainya kesejahteraan sosial dan keamanan yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Kesejahteraan masyarakat dan hidup damai harus menjadi prioritas utama pemerintah saat mengelola negara. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mempertimbangkan prioritas, program, metode, dan landasan filosofisnya. Dimensi sarana mencakup sistem dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengorganisasikan praktik penyelenggaraan negara. Dimensi ini terdiri dari dua pola normatif: tatanan politik harus diatur berdasarkan prinsip keadilan, pluralitas, dan solidaritas, dan kekuatan politik harus diatur berdasarkan prinsip timbal balik. Pelaku dan dimensi tindakan politik menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari keutamaan atau kualitas moral pelaku serta rasionalitas tindakan mereka. Jika pelaku memahami situasi dan memahami masalah yang dihadapi, tindakan politik dapat dianggap masuk akal.

Adapun Pancasila sebagai landasan Politik yakni Dalam bahasa Sanskerta, "Pancasila" berarti prinsip atau asas dari kehidupan bernegara, dan sebagai dasar negara, semua tindakan pemerintah harus mengikuti nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Adapun penjelasan dalam sila-sila tersebut yakni : Dalam bahasa Sanskerta, "Pancasila" berarti prinsip atau asas dari kehidupan bernegara, dan sebagai dasar



negara, semua tindakan pemerintah harus mengikuti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.

1. Sila Pertama: Berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa", nilainya Pancasila berbicara tentang kata-kata Tuhan. Banyak dari kita masih salah memahami sila pertama ini. Tuhan Yang Maha Esa berarti Tuhan yang hanya satu. Tetapi jika kita berbicara bahasa lain, seperti bahasa Sanskerta, "Maha" berarti mulia, dan "Esa" berarti keberadaan mutlak. Negara Indonesia memberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan iman dan kepercayaan setiap orang. Nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia berasal dari sila pertama ini. Semua aspek yang akan dilaksanakan diwajibkan untuk berdasarkan dengan sila pertama termasuk dalam menjalankan politik dalam demokrasi (Al Firdausy, A. M. S., Mumtazah, N. D., Bramantya, S. A., Fahira, S. N. & Supriyono, S. 2024.)
2. Sila Kedua : Berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"
Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudaya serta memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta (Notonegoro, 1975). Pada sila yang kedua ini terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dalam menjalankan Politik dalam demokrasi harus bersifat adil dan tidak ada kecurangan di dalamnya. (Aristin, R. 2016).
3. Sila Ketiga : Berbunyi "Persatuan Indonesia"
Persatuan bangsa Indonesia dapat dilambangkan dengan "Bhineka Tunggal Ika" yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Persatuan Indonesia menjadi salah satu faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, melalui demokrasi yang berjalan berdasarkan sila pertama dan sila kedua diharapkan kita dapat menjalankan sila ke tiga yaitu memperoleh persatuan di dalam Negara, persatuan ini dapat mewujudkan perdamaian antar masyarakat. Semangat persatuan merupakan kunci dari terbentuknya Indonesia yang merdeka, maka dari itu persatuan menjadi hal pokok yang harus ditingkatkan demi kelangsungan hidup bangsa yang aman dan damai.
4. Sila Keempat : Dalam Sila Keempat, "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan", istilah "kerakyatan" berasal dari kata "rakyat", yang berarti sekelompok orang yang tinggal di sebuah wilayah negara. Sila keempat berbicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dan perwakilan, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi yang dianut dapat langsung atau tidak langsung. Demokrasi



didefinisikan sebagai tatanan hidup bersama, yang berarti semua orang dapat hidup bersama. Demokrasi erat kaitannya dengan kebebasan, yang berarti setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan pemimpin negara mereka sendiri. Sementara itu, "dipimpin oleh hikmah" berarti bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, pintar, dan memiliki keahlian dalam memimpin.

5. Sila Kelima : Berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Keadilan sosial adalah keadilan secara bersama-sama, artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan memuat dalam segala bidang termasuk dalam demokrasi. Sedangkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik. (Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A. (2021).)

Berdasarkan hal di atas, Pancasila sangat relevan sebagai landasan etika politik karena:

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan demokrasi, membantu menjaga keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.
2. Etika politik yang berlandaskan Pancasila mendorong dialog, musyawarah, dan kompromi sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencapai konsensus.
3. Nilai-nilai moral Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi pedoman bagi para pemimpin politik dalam mengambil keputusan dan bertindak. Menguntungkan semua pihak.
4. Etika politik yang berlandaskan Pancasila mendorong adanya kepedulian terhadap kesejahteraan bersama dan menghindari tindakan yang merugikan atau mendiskriminasi kelompok tertentu.
5. Etika politik yang berlandaskan Pancasila mendorong para pemimpin untuk memprioritaskan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri.
6. Etika politik yang berlandaskan Pancasila



4.2 Peran Pancasila di tengah Pragmatisme Politik di Indonesia pada era demokrasi

Pada era globalisasi, kebebasan berpolitik sering mengabaikan standar moral masyarakat, yang menyebabkan masalah etika politik yang luas di seluruh dunia. Ada beberapa masalah dengan Pancasila sebagai landasan etika politik di era globalisasi, seperti:

1. Politik uang dan korupsi masih merupakan pelanggaran etika politik yang marak di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa para politikus dan pejabat publik belum benar-benar memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
2. Fanatisme terhadap agama, suku, dan ras tertentu dapat memicu intoleransi dan perpecahan di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menekankan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
3. Penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial dapat menyebabkan polarisasi dan kebencian di antara kelompok masyarakat. Salah satu nilai utama Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa, dapat dirusak oleh hal ini.
4. Ketidakadilan dan frustrasi masyarakat dapat disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila sebagai prinsip moral politik.
5. Budaya asing dan globalisasi dapat berdampak baik atau buruk pada Indonesia. Globalisasi dapat menawarkan peluang untuk kemajuan nasional, tetapi juga dapat membawa pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan prinsip Pancasila.

Pragmatisme dalam demokrasi mengacu pada pendekatan politik yang berorientasi pada hasil praktis, sering kali menyesuaikan nilai dan ideologi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut riset, pendekatan ini sering muncul ketika proses demokrasi menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidakadilan, dan rendahnya partisipasi politik masyarakat.

Feiruz Rachmita Alamsyah dalam buku *"Pragmatisme Demokrasi: Kajian dari Berbagai Polemik"* menyoroti bahwa pragmatisme dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kelemahan demokrasi, seperti dominasi elite dan kepentingan pribadi dalam pemilu. Demokrasi pragmatis bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan, melampaui sekadar pemilu formal. Namun, pendekatan ini juga memunculkan dilema karena berisiko mengesampingkan nilai-nilai demokrasi murni, seperti kesetaraan dan keadilan. Di Indonesia, pragmatisme sering terlihat dalam perilaku politik yang lebih berfokus pada keuntungan elektoral dan penguatan kekuasaan daripada penerapan ideologi politik



tertentu. Hal ini mencerminkan adaptasi politik terhadap konteks sosial dan ekonomi yang dinamis.

Peran Pancasila di tengah pragmatisme politik pada era demokrasi di Indonesia memiliki arti penting sebagai pedoman untuk menjaga moralitas, integritas, dan orientasi keadilan dalam politik. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan ideologis yang mampu menghadapi tantangan pragmatisme politik yang cenderung mengutamakan kepentingan praktis dan sesaat.

1. Menjadi Landasan Moral dan Etika Politik: Sila-sila Pancasila, seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (sila kedua), menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Dalam demokrasi, ini membantu mencegah pelanggaran moral akibat pragmatisme yang berlebihan, seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan
2. Mendorong Partisipasi Demokratis: Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menggarisbawahi pentingnya dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Hal ini relevan untuk memastikan bahwa demokrasi tetap partisipatif dan tidak hanya dikendalikan oleh elit politik
3. Menjaga Persatuan dalam Keberagaman: Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menegaskan pentingnya persatuan di tengah keanekaragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Dalam konteks pragmatisme politik, ini menjadi acuan untuk menolak kebijakan yang memecah belah
4. Memastikan Keadilan Sosial: Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," memberikan arahan untuk kebijakan politik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada kepentingan kelompok tertentu. Ini relevan dalam menghadapi praktik politik pragmatis yang sering kali mengabaikan kesetaraan dan kesejahteraan

Secara keseluruhan, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dan ideologis dalam politik Indonesia, membantu menjaga stabilitas, integritas, dan keadilan di tengah tantangan pragmatisme yang sering kali bersifat jangka pendek.

Dengan mengingat bahwa Pancasila adalah ideologi dan falsafah nasional Indonesia, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan secara universal, ada kemungkinan besar bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika politik dapat diterapkan oleh bangsa Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila memiliki tujuan untuk memberikan arah kepada penyelenggaraan kehidupan nasional dalam bidang politik,



ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Sebagai ideologi nasional Indonesia, Pancasila berfungsi untuk memberikan standar untuk kehidupan bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan bersifat universal, artinya nilai-nilai tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana saja dan kapan saja.

5. KESIMPULAN

Etika politik berperan penting dalam membangun demokrasi yang berlandaskan moralitas, integritas, dan tanggung jawab publik. Dalam demokrasi, etika politik mengarahkan pemimpin dan masyarakat untuk menjalankan kekuasaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Namun, tantangan besar muncul ketika praktik pragmatisme politik, seperti korupsi, manipulasi kekuasaan, dan politik uang, mencemari prinsip demokrasi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, pendidikan politik, dan penguatan partisipasi masyarakat diperlukan untuk memastikan praktik politik tetap sesuai dengan prinsip demokrasi yang substantif dan bermartabat.

Di era demokrasi yang kerap didominasi oleh pragmatisme politik, Pancasila memiliki peran strategis sebagai landasan moral dan ideologi negara. Pancasila memberikan arah bagi praktik politik yang tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga mengutamakan kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa. Misalnya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut pemimpin memiliki integritas moral, sedangkan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memastikan bahwa kebijakan politik harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, pragmatisme politik sering kali mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama ketika politik menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, implementasi dalam kebijakan publik, serta keteladanan dari para pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Firdausy, A. M. S., Mumtazah, N. D., Bramantya, S. A., Fahira, S. N. & Supriyono, S. (2024.) Implementasi Sila Pertama Pancasila Dalam Upaya Membangun Generasi Muda Yang Religius. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 8(1): 1810-1818



- Aristin, R. (2016). Aktualisasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Era Reformasi. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 27-36
- Al Khanif, D. (2017). *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKIS.
- Banerjee, A., dkk. (2021). *Journal of Political Pragmatism*
- Cahyadi, R. (2021). Etika Politik dan Pemerintahan. Pusaka Media.
- Febriany, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Nilai-nilai pancasila dan dinamika etika politik indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*,
- Handoyo, E., Wijayanti, T., Irawan, H., Khomsani, I., & Hermawan, D. (2021). Penguatan Karakter Anti Korupsi Bagi Lurah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*
- Hernadi Affandi, S. H. (2020). *Pancasila-Eksistensi dan Aktualisasi*. Penerbit Andi.
- Hunayati, H. (2016). RELEVANSI PANDANGAN GEREJA TENTANG POLITIK BAGI KARYA PASTORAL DI PAROKI KATEDRAL ST. MARIA PALANGKA RAYA. *SEPAKAT-Jurnal Pastoral Kateketik*, 3(1), 107–118.
- Kartika, I. M. (2018). Peranan nilai-nilai pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia. *Widya Accarya*, 9(2)
- Mulyatno, C. B., & Yosafat, Y. (2022). Praktik Bergotong-Royong dalam Hidup Bermasyarakat Sebagai Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*
- Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222-231.
- Suroto, S. (2015). Harkat dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 310–318.
- Zulfadli, Z., Siallagan, N. J. M., & Nasution, S. R. A. (2022). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Sila-Sila Pancasila Dalam Lambang Negara “Garuda Pancasila” Dengan Menggunakan Model Talking Stick Pada Siswa Kelas III SD Negeri 084089 Sibolga. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*,